

of 27/June 2024
Acc.

PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA PREVALENSI STUNTING DI KABUPATEN PURWOREJO

Sekar Alifia Rahmawati, Titik Djumiarti, Triyuniningsih

Departemen Administrasi Publik,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The main element of the collaborative governance process is the involvement of multistakeholder roles in problem alleviation arrangements, especially the acceleration of stunting reduction. The problem in the study is that the average stunting Purworejo Regency is higher than stunting in Central Java. The research aims to analyze the collaborative process of accelerating stunting reduction Purworejo Regency using the collaborative governance theory Ansell and Gash. The research uses a qualitative descriptive approach and data collection through interviews, observations, and document studies. The results show that face-to-face dialogue has been carried by the Health Office, Social Service for Population Control and Family Planning with private sector, academics, and the community through formal and informal meetings. Build trust by creating a positive image of accelerating stunting reduction with communication, coordination, and information disclosure. The commitment in the stakeholder collaboration process is different but in line with its role and responsibility in reducing stunting. A common understanding already in hands of OPDs, but the problem of stunting is still underestimated, so it's necessary to involve the community in stunting reduction programs. Provisional results of Purworejo Regency are committed to starting from government, private sector, academics, and community to alleviate stunting. Factors that hinder Collaborative Governance to accelerate the reduction of stunting prevalence Purworejo Regency are cultural factors, institutional factors, and political factors. This research provides recommendations to make consistency meetings, optimize information dissemination and publication as a form of openness, and expand collaboration networks with private sector so that collaboration process achieves goal of reducing stunting Purworejo Regency.

Keywords: *Collaborative Governance, Stakeholders, Stunting*

PENDAHULUAN

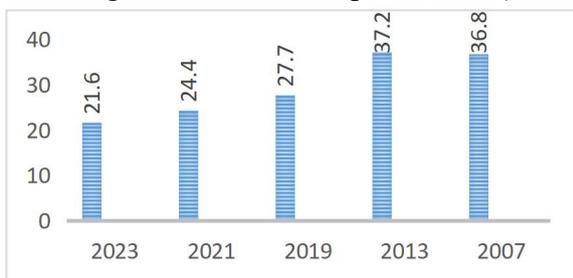
A. Latar Belakang

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada 1000 HPK. Penyebab stunting antara lain pola asuh yang buruk, pelayanan ibu hamil yang tidak memadai, hambatan akses keluarga terhadap makanan bergizi, hambatan terhadap air bersih dan sanitasi, serta penyakit menular pada anak. Selain itu, ada pula alasan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik (Carolina, 2021). Kondisi stunting tidak dapat diubah, sehingga upaya signifikan dapat dilakukan untuk mencegah malnutrisi dengan

mencegah stunting (Organisasi Kesehatan Dunia, 2014).

Data terkini Studi Status Gizi di Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2023 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Jika data prevalensi stunting tahun 2023 dibandingkan dengan data prevalensi stunting tahun 2007, maka secara keseluruhan akan terjadi penurunan sebesar 15,2% dalam kurun waktu 14 tahun.

Namun, diperlukan perbaikan agar angka stunting dapat diturunkan lebih cepat dan mencapai target 14% pada tahun 2024 (RPJMN) (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas, 2022).



Gambar 1. 1 Prevalensi Balita Stunted dari Tahun 2007-2023

Sumber: Riskesdas dan SSGBI Kemkes RI (2023).

Karena prevalensi yang disebutkan di atas masih lebih dari 20%, target pemerintah untuk tahun 2024 turun menjadi 14,0. Jadi, pemerintah meminta semua orang dan kader untuk memprioritaskan masalah kesehatan ini. Di Indonesia, masalah yang terjadi harus diselesaikan

secara terbuka karena kerja sama pemerintah dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mengurangi masalah.

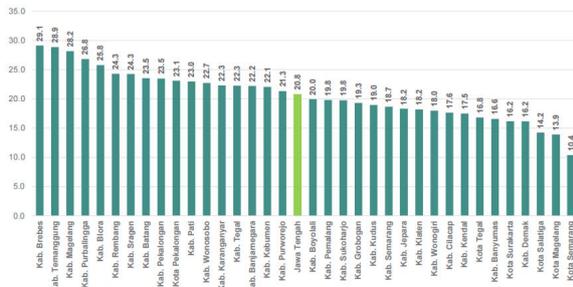
Dalam mengatasi stunting, pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai organisasi, termasuk lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah. Peningkatan akses terhadap makanan bergizi yang baik, pelatihan gizi, dan instruksi tentang pola makan yang seimbang, serta peningkatan akses terhadap perawatan kesehatan dan sanitasi yang memadai, adalah semua upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Sebab, dalam target 2.2 *Sustainable Development Goals* (SDGs) tertera bahwa seluruh negara sepakat untuk mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030, termasuk mencapai target keberhasilan penanganan *stunting* dan *wasting* di tahun 2025 (United Nations, n.d.).

Fenomena stunting adalah salah satu permasalahan pada bidang kesehatan yang utama untuk ditangani (Apriska skk 2022; Rahayu dkk, 2022; Putri dan Nurcahyanto, 2022; serta Herlianti, 2020). Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2017), stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan anak balita akibat kekurangan gizi sehingga pertumbuhannya lambat dibandingkan anak seusianya.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia yang integratif melalui

koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Indonesia sebagai target prevalensi stunting pada balita sebesar 14% pada tahun 2024 dalam upaya untuk mengakhiri stunting. Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 memasukkan strategi untuk mengatasi stunting

Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, SGI 2022



Gambar 1.2 Angka Prevalensi Balita Stunting Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Hasil SSGI, 2022

Berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, diperoleh informasi bahwa Kabupaten Purworejo memiliki angka prevalensi stunting sebesar 21,3% yang dimana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata stunting di Provinsi Jawa Tengah. Dengan ini maka, Kabupaten Purworejo menjadi salah satu daerah prioritas stunting yang perlu perhatian khusus dari pemerintah dan berbagai pihak terkait lainnya. Perlu diketahuinya stunting di Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 meningkat menjadi 21,3%, menurut data SSGBI.

Tabel 1. 1 Data Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo

No	Tahun	Prevalensi Stunting
1	2022	21,3%
2	2021	15,7%
3	2019-2020	27,6%
4	2018	23,33%

Sumber: Survei Status Gizi Balita Indonesia (2018-2022)

Berdasarkan data pada Tabel-1, dapat diketahui bahwa Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan angka stunting sebesar 5,6% pada tahun 2022-2023. Tentunya hal inilah yang menjadi perhatian banyak pihak karena masalah stunting tidak dapat selesai apabila hanya dilakukan oleh satu pihak saja melainkan penyelesaian permasalahan stunting melibatkan kolaborasi banyak pihak mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Jawa Tengah dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting memberikan dasar untuk upaya penurunan stunting di Kabupaten Purworejo. Untuk menurunkan prevalensi stunting, pemerintah melakukan dua jenis intervensi: spesifik dan sensitif.

Intervensi gizi sensitif ditujukan kepada masyarakat umum melalui berbagai kegiatan di luar sektor kesehatan. Sebaliknya, intervensi spesifik difokuskan pada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, dan berkaitan dengan sektor kesehatan, dan memiliki jangka waktu pendek.

Dalam mengakselerasi penurunan tingkat stunting di Kabupaten Purworejo, diperlukan pendekatan yang terfokus dan peka terhadap masalah tersebut. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah terdapat Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Sensitif. Di Purworejo, intervensi spesifik dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dengan menyelenggarakan program-program yang berintervensi pada akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

Sedangkan intervensi sensitif, mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi stunting, seperti kemiskinan, pendidikan, peran gender, dan kebiasaan makan dan pola asuh dimana di Kabupaten Purworejo dikerjakan oleh OPD lintas sektor lainnya selain Dinas Kesehatan. Koordinasi yang efektif, sinergi yang kuat, dan sinkronisasi yang baik antar entitas tersebut menjadi kunci untuk mengimplementasikan intervensi yang berkualitas dan berdampak secara signifikan dalam menangani permasalahan stunting di

Indonesia khususnya di Kabupaten Purworejo. Diharapkan bahwa selain berkolaborasi, setiap stakeholder juga dapat berkomunikasi dengan baik untuk membentuk jejaring yang saling mendukung.

Komunikasi dapat membangun kepercayaan dan pemahaman antar-stakeholder, yang berarti bahwa dukungan dan kerja sama akan lebih mudah. Untuk mendukung peran masing-masing *stakeholder*, komunikasi juga diperlukan. *Stakeholder* tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik jika tidak ada komunikasi. Berdasarkan temuan terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan upaya percepatan penurunan prevalensi Stunting yang berkaitan dengan lemahnya koordinasi, sinergitas, dan komunikasi antar aktor.

Permasalahan kerja sama antar *stakeholders* yang diwarnai banyak persoalan seperti sikap serta persepsi para aktor yang tidak sama. Para *stakeholder* yang terlibat memiliki latar belakang kepentingan yang berbeda sehingga belum adanya kesamaan visi dan misi. Hal ini seringkali terjadi pada saat pertemuan rapat koordinasi bersama *stakeholder* yang menimbulkan perbedaan pandangan.

Keterlibatan yang dilakukan antar aktor dalam percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Purworejo belum berjalan secara dengan konsisten. Hal ini dapat dilihat dari Dialog tatap muka, upaya

membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama dan hasil sementara. Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai pencegahan Stunting. Beberapa masyarakat memandang bahwa Stunting merupakan penyakit genetik yang berasal dari Orang Tua sehingga sulit diubah keadaannya. Kemudian juga adanya keterbatasan latarbelakang pendidikan masyarakat yang menyebabkan penanganan permasalahan menjadi lebih kompleks.

Faktor yang mempengaruhi Kabupaten Purworejo dalam proses kolaborasi penurunan angka prevalensi stunting menarik untuk dianalisis lebih lanjut utamanya terkait dengan bagaimana proses *Collaborative Governance* dijalankan oleh setiap *stakeholders* terlibat. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa penelitian terdahulu dapat mendukung pentingnya proses *Collaborative Governance* khususnya dalam penanganan percepatan penurunan angka prevalensi stunting.

Penelitian yang dilakukan oleh Herlianti (2020), Lailia dkk (2021), dan Rosalia et al. (2022) memiliki kemiripan hasil analisis yang menyatakan bahwa kolaborasi yang melibatkan banyak *stakeholders* sangat diperlukan dalam pelaksanaan program yang mendukung penurunan angka stunting. Lebih lanjutnya, berdasarkan analisis yang telah disimpulkan

capaian dari tujuan upaya penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi juga melibatkan multisektor yaitu kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

Dalam hal ini yang ditekankan yaitu pada percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan berbagai pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi, komitmen, dan dukungan dari multisektor (banyak *stakeholder*) sangat penting dalam pelaksanaan program maupun kebijakan untuk membantu menyelesaikan masalah dan mewujudkan tujuan.

Selain itu, analisis proses kolaboratif kepemimpinan dalam pelaksanaan program atau kebijakan pada berbagai bidang kehidupan sangat penting. Dengan demikian, berdasarkan pada berbagai uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, diperlukan analisis mengenai proses *Collaborative Governance* guna menjawab pertanyaan penelitian **“Bagaimana Proses *Collaborative Governance* dalam Mendukung Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo?”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo?
2. Apa saja Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo?

A. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Proses *Collaborative Governance* dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat proses *Collaborative Governance* dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo.

B. Kajian Teori

Paradigma Administrasi Publik

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam paradigma keenam atau paradigma *governance*. Paradigma tersebut menekankan bahwa stakeholder harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam penyelesaiannya. Paradigma ini menekankan bahwa dalam penyelenggaraan

pemerintahan terjadi interaksi antara sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, paradigma *Governance* menjelaskan tentang perkembangan pemerintah ke arah pemerintahan yang baik atau *Good Governance* melalui penciptaan sinergi antar ketiga pihak tersebut saat melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.

Manajemen Publik

Stoner (dalam Handoko, 2011:8) mengemukakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyesuaikan masalah publik dengan menerapkan fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dikenal sebagai manajemen publik (Sahya Anggara, 2016:545).

Collaborative Governance

Sementara itu, Ansell dan Gash (2008) melihat *collaborative governance* sebagai pengaturan di mana lembaga publik melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik. Mereka menekankan pentingnya membangun kepercayaan, komitmen,

pemahaman bersama, dan hasil sementara sebagai faktor keberhasilan kolaborasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Situs penelitian terletak di Kabupaten Purworejo. Subjek penelitian ditentukan secara purposive. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Collaborative Governane dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo

Dalam Administrasi Publik, terdapat pendekatan yang dianggap tepat untuk melihat hubungan antar *stakeholder* dalam pemerintahan. Collaborative governance adalah proses kerja sama atau interaksi antar aktor pemerintah dan nonpemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik secara kolektif karena adanya persamaan tujuan daripada menyelesaikannya secara terpisah. Menurut

Anshell dan Gash dalam Sudarmo (2011:101), kolaborasi dapat dibagi menjadi dua kategori: kolaborasi dalam konteks proses dan kolaborasi dalam konteks normatif.

1. Face to Face Dialogue

Menurut Ansell dan Gash, *Collaborative Governane* dibangun melalui dialog atau komunikasi secara tatap muka antar pemangku kepentingan (stakeholders). Prosesnya berfokus pada mencapai konsensus atau kesepakatan. Komunikasi tatap muka merupakan tahap sangat penting dalam proses kolaborasi karena ini membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses.

Pada proses *collaborative governance* percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo, pelaksanaan *face to face dialogue* berjalan cukup baik. Terdapat berbagai kesepakatan yang pada akhirnya dapat diputuskan bersama untuk mencapai tujuan penurunan stunting di Kabupaten. Pertemuan yang awalnya hanya dilakukan oleh jajaran organisasi perangkat daerah kemudian mencapai hasil yang didalam penyelesaian masalah stunting tidaklah bisa berjalan sendirian namun tentunya juga melibatkan pihak-pihak lainnya seperti swasta, akademisi, dan masyarakat. Keterlibatan pihak lainnya itu bentuk kolaborasi dengan OPD terkait semuanya yang dimulai dengan

face to face dialogue bertujuan untuk memperjelas pemahaman dan tupoksi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan program.

Penyelenggaraan pertemuan selanjutnya ini dilakukan oleh Bappedalitbang bersama lintas sektor yaitu rembuk stunting, dan pembahasan Pentasyarufan Program Timbang (Tingkatkan Kemampuan Gizi Seimbang) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo bersama stakeholders non pemerintah sebagai upaya percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pendekatan kerja sama kemitraan yang inklusif dan berkelanjutan dengan dihadiri aktor swasta seperti Lazizmu dan Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Purworejo. Selain kolaborasi dari Dinas Kesehatan juga terdapat kolaborasi dari DinsosdaldudKB Kabupaten Purworejo dengan beberapa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan melakukan beberapa kali pertemuan untuk menciptakan dan meningkatkan komunikasi, CSR tersebut antara lain PT BRS Sampoerna Purworejo, PT Pokphan Purworejo, Kantor Cabang BRI Purworejo, RS Loano Purworejo, RS Budi Sehat, Griya Saras Husada yang senantiasa berkolaborasi menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo.

2. Trust Building

Proses *collaborative governance*, menurut Ansell dan Gash, lebih fokus pada

membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan daripada hanya negosiasi antar aktor. Karena munculnya Collaborative Governance disebabkan oleh ketidakpercayaan stakeholder.

Menurut De Seve dalam Sudarmo (2011:11), dalam mengukur keberhasilan governance kolaboratif adalah sebagai berikut: kepercayaan antar aktor, yang didasarkan pada hubungan profesional atau sosial; aktor percaya pada upaya atau informasi dari aktor lain dalam jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam membangun kepercayaan baik antar pihak satu dengan lainnya maupun dengan masyarakat telah diupayakan semaksimal mungkin. Konsistensi yang dilakukan dalam membangun kepercayaan yaitu para pemangku kepentingan melakukan tugas yang sesuai dengan arahan regulasi dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu juga terdapat interaksi yang dilakukan oleh tiga pemangku kepentingan utama yang selalu terbuka dalam kegiatan diskusi dan pertemuan untuk membahas keresahan yang dialami selama menjalankan program masing-masing.

Karena dengan adanya pertemuan dan komunikasi dapat menjadi sarana *stakeholders* stunting di Kabupaten Purworejo menghadirkan informasi secara jelas dan jujur, serta memfasilitasi dialog yang inklusif, semua pihak diajak untuk

berbagi pandangan, kekhawatiran, dan harapan mereka. Selain itu monitoring dan evaluasi terhadap keberjalanan program serta pelaporan penggunaan dana dalam penyelenggara juga harus dilakukan dengan jelas, lugas, dan transparansi. Semua upaya ini harus dilakukan menyeluruh kepada semua aktor atau pihak yang terlibat jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan apalagi sampai adanya praduga penyalagunaan atau ketidak tepatan sasaran masyarakat terdampak.



Gambar 3.2 Kegiatan Penyaluran Bantuan BAAS

Sumber : Dokumentasi peneliti

Dengan demikian, *trust building* dalam proses *collaborative governance* dalam percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kerja sama yang efektif, tetapi juga membentuk pondasi yang kuat untuk hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan di antara semua pemangku kepentingan.

3. Commitment to The Process

Beberapa referensi telah disimpulkan oleh Ansell dan Gash, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan Collaborative Governance adalah komitmen

aktor. Sebuah survei yang dilakukan pada kelompok kolaborasi Amerika dan Australia, dalam Ansell dan Gash (2007:559) mengemukakan bahwa komitmen aktor adalah komponen terpenting dalam mempercepat proses kolaborasi. Para aktor dimotivasi untuk menerapkan Collaborative Governance karena komitmen. Namun, menurut Ansell dan Gash, para aktor tidak ingin kepentingan mereka diabaikan.

Komitmen terhadap proses ini penting karena penurunan stunting bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dengan cepat atau oleh satu pihak saja dengan kata lain elemen pemerintah Kabupaten Purworejo, tetapi diperlukannya lintas sektor bersama lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat umum harus menjalankan komitmen masing-masing dengan penuh kesungguhan agar setiap program atau kegiatan yang dijalankan atas dasar kebijakan dapat berjalan dengan baik tidak ada miss informasi satu dengan lainnya. Diperlukan koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, serta konsistensi dalam melaksanakan strategi dan program yang telah disepakati.

Komitmen yang kuat terhadap proses kolaborasi penurunan angka prevalensi stunting akan memastikan bahwa semua pihak tetap fokus dan terlibat dalam upaya bersama untuk mengurangi angka

stunting secara berkelanjutan sesuai dengan arahan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian tujuan dari regulasi yang telah ditetapkan dapat dicapai maksimal dengan mengoptimalkan kemampuan semua aktor atau stakeholders collaborative governance percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo khususnya.

4. *Shared Understanding*

Pada *Collaborative Governance*, para *stakeholders* harus memiliki kesamaan pemahaman tentang tujuan yang hendak dicapai. Menurut Ansell dan Gash, *shared understanding* adalah kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan dan diperlukan untuk mengatasi masalah. Agar tercapainya tujuan, menurut Ansell and Gash tahapan *shared understanding* sangat diperlukan dalam proses kolaborasi.

Pemahaman bersama juga mengacu pada kesepakatan bahwa proses collaborative governance pada percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas disiplin, serta keterlibatan semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah,

masyarakat sipil, dan individu. Hal ini mencakup pengakuan akan peran yang berbeda-beda yang dimainkan oleh masing-masing pemangku kepentingan dalam memastikan keberhasilan upaya pencegahan stunting di Kabupaten Purworejo sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama. Berbagai kesepakatan dan kesepakatan telah dilakukan sehingga terwujudnya berbagai program serta kegiatan yang berkorelasi untuk penurunan stunting di Kabupaten Purworejo seperti Program Timbang, Genre Goes to School, pembentukan PIK-R, kegiatan CETING, pemberian PMT, Posyandu remaja, ibu hamil, dan anak baduta balita, dan beberapa program kegiatan bermanfaat lainnya. Dengan ini jelas sekali bahwa percepatan penurunan angka prevalensi stunting tidak bisa hanya dilakukan berdasarkan pemahaman dan kesepakatan dari satu pihak saja melainkan harus ada peran dan partisipasi dari pihak lainnya baik itu OPD, swasta, organisasi, akademisi, maupun keterlibatan langsung masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, *shared understanding* dalam proses collaborative governance dalam percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo bukan hanya tentang memahami masalah, tetapi juga tentang membangun konsensus, kepercayaan, dan komitmen untuk bertindak bersama-sama. Ini menjadi landasan yang kokoh bagi proses kolaboratif

dalam menurunkan stunting, memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak tidak hanya terkoordinasi, tetapi juga berdampak secara signifikan dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu Kabupaten Purworejo mencapai target nasional angka stunting dibawah 14% hingga dapat mencapai zero stunting.

Intermediate Outcomes

Menurut sejumlah studi kasus, kolaborasi lebih mungkin terjadi pada situasi di mana tujuan dan keuntungan kolaborasi relatif konkret dan kolaborasi dianggap berhasil. Terlepas dari kenyataan bahwa *intermediate outcomes* dapat merupakan output nyata dari proses tersebut, *intermediate outcomes* dianggap sebagai hasil proses yang penting untuk menciptakan momentum yang dapat mendorong keberhasilan tim. Keberhasilan seperti ini dapat memberikan umpan balik pada proses kerja tim, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen.

Intermediate outcomes memainkan peran penting dalam mengukur kemajuan dan efektivitas upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan. Di Kabupaten Purworejo, *intermediate outcomes* ini mencerminkan pencapaian yang terjadi di tengah-tengah kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat umum dalam upaya menangani masalah

stunting. Hasil sementara telah didapatkan dari kolaborasi penurunan stunting di Kabupaten Purworejo yang dilakukan oleh multi sektor. Melalui pembangunan atau peningkatan fasilitas kesehatan, pelatihan petugas kesehatan, dan kampanye penyuluhan, masyarakat Purworejo mendapatkan akses yang lebih mudah dan lebih baik terhadap layanan kesehatan yang meliputi pelayanan gizi, pemantauan pertumbuhan anak, dan edukasi kesehatan ibu dan anak yang mudah didapatkan dengan akses terjangkau.

Pembentukan kebijakan dan rencana aksi yang terkoordinasi juga menjadi *intermediate outcomes* penting yang dilakukan di Kabupaten Purworejo. Pemerintah daerah bersama dengan semua pemangku kepentingan terlibat dalam penyusunan kebijakan dan rencana aksi yang terkoordinasi untuk menangani masalah stunting, sehingga memastikan bahwa upaya penurunan stunting berjalan dengan terarah dan efektif.

Melalui kolaborasi ini, masyarakat di Kabupaten Purworejo akan merasa didukung dan dipercayakan oleh para aktor kolaborasi dalam penanganan masalah stunting. Ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan partisipasi masyarakat dalam program-program gizi dan kesehatan yang ditawarkan. Selain itu, dengan adanya dukungan dan keterlibatan langsung dari para stakeholders, upaya penanganan

stunting dapat menjadi lebih terarah dan efektif, sehingga hasil yang diharapkan dapat dicapai lebih cepat dan lebih signifikan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terlibat untuk terus memperkuat kolaborasi mereka, membangun komunikasi yang efektif, dan memastikan bahwa upaya-upaya dalam masalah stunting di Kabupaten Purworejo terkoordinasi dengan baik. Dengan demikian, Kabupaten Purworejo dapat menjadi contoh yang sukses dalam penanganan masalah stunting, dan masyarakatnya dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah.

B. Faktor Penghambat Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo

Faktor Budaya

Faktor Kultural pada SDM lah yang menjadi faktor penghambat yang disebabkan oleh kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kendala. Banyak petugas lapangan yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani masalah gizi dan stunting. Sistem monitoring dan evaluasi yang lemah juga menjadi penghambat. Kurangnya indikator kinerja yang jelas dan terukur membuat sulit untuk mengukur keberhasilan program-program

penurunan stunting. Pengawasan dan evaluasi yang minim menyebabkan masalah-masalah di lapangan sering terabaikan. Anggaran yang terbatas juga menjadi kendala. Alokasi anggaran untuk program-program gizi dan penurunan stunting di Kabupaten Purworejo seringkali tidak memadai. Masalah gizi seolah kurang diprioritaskan dalam perencanaan anggaran, sehingga menghambat upaya penurunan stunting.

Terakhir, budaya organisasi yang kurang mendukung juga menjadi penghambat. Kurangnya insentif atau penghargaan bagi kinerja yang baik dalam program penurunan stunting membuat motivasi petugas lapangan menurun. Resistensi terhadap perubahan dan inovasi dalam menangani masalah stunting juga sering terjadi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya yang komprehensif, seperti penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, alokasi anggaran yang memadai, komitmen pimpinan yang kuat, serta pembudayaan organisasi yang mendukung upaya penurunan stunting secara berkelanjutan di Kabupaten Purworejo.

Faktor Institusi

Dengan adanya SOP pada OPD atau lintas sektor membuat kejelasan tupoksi dan aturan dalam menjalankan program masing-masing tanpa adanya tumpang tindih

kewenangan. Kemudian untuk yang menghambat adalah masih adanya struktur hierarkis pada beberapa organisasi, tidak semua menerapkan hierarkis pada proses collaborative governance ini. Selain itu juga adanya kekakuan instansi dalam menjalankan program stunting dengan kata lain tidak bisa fleksibel menjalankan tupoksinya. Pada dasarnya, dalam kolaborasi ini seharusnya setiap stakeholders menerapkan sifat spontanitas terhadap permasalahan stunting di Kabupaten Purworejo dengan tetap berjalan sesuai aturan perundang-undangan salah satunya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan angka prevalensi stunting.

Faktor Politik

Dalam kolaborasi yang ada belum terdapatnya sebuah program inovasi dari keseluruhan *stakeholders* yang terlibat. Dengan kata lain, program atau kegiatan yang dilakukan hanya sesuai dengan kepentingan masing-masing untuk mencapai tujuan politiknya. Hal ini lah yang perlu diperhatikan kedepannya agar terdapat koordinasi dan kesepakatan dari awal secara bersama-sama agar dapat dilaksanakan dengan efektif. Kurangnya keterlibatan masyarakat dan kelompok kepentingan dalam proses perumusan kebijakan terkait stunting. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Diketahui juga bahwa masih adanya ego sektoral yang menjadikan penanganan stunting bukan prioritas dari tugas dan tanggungjawabnya. Demikianlah yang menyebabkan faktor politik dapat mempengaruhi terhambatnya proses kolaborasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Purworejo. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya yang komprehensif, seperti meningkatkan konsistensi kebijakan, menumbuhkan komitmen politik yang kuat, melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, meminimalisir kepentingan politik yang menghambat, serta memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program-program penurunan stunting di Kabupaten Purworejo.

PENUTUP

Kesimpulan

Proses kolaboratif untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Purworejo melalui Collaborative Governance dijalankan melalui serangkaian tahapan. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi melibatkan berbagai pihak dengan tujuan bersama. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo berperan sebagai aktor utama dalam menangani masalah stunting. Oleh karena itu, mereka yang memimpin sektor

tersebut bertanggung jawab untuk mengkoordinir seluruh pihak yang terlibat, termasuk BAPPEDA Purworejo.

Pada tahapan dialog tatap muka, tahapan inilah yang memiliki pengaruh dalam proses kolaborasi percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo. Karena dengan adanya pertemuan baik formal ataupun non formal dapat menciptakan keharmonisan dan keselarasan untuk memahami tujuan yang ingin dicapai. Tahapan *face to face dialogue* dalam proses kolaborasi ini sudah dilaksanakan dengan adanya pertemuan yang dilaksanakan 3-4 kali dalam satu tahun. Namun, keterlibatan *stakeholders* dalam proses kolaborasi tidak disertai dengan waktu yang terjadwalkan dengan kata lain belum adanya ruang komunikasi yang berkelanjutan.

Dalam membangun kepercayaan pada kolaborasi percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo sudah adanya usaha-usaha dari setiap *stakeholders*. Tahapan ini, memiliki peran yang berpengaruh. Pada tahapan ini setiap *stakeholders* dituntut untuk dapat bertanggungjawab dalam upaya pembangunan citra stunting di Kabupaten Purworejo agar lebih baik lagi.

Pada tahapan komitmen terhadap proses kolaborasi penurunan stunting sudah berjalan baik dengan keterlibatan setiap pemangku kepentingan yang menjalankan

peran sesuai dengan tupoksinya. Pemahaman bersama pada tahapan proses kolaborasi, masih terdapat tujuan dan nilai yang belum dipahami oleh pemangku kepentingan.

Tahapan hasil sementara pada proses kolaborasi penurunan prevalensi stunting di Purworejo sudah dapat dilihat hasilnya, yaitu terdapatnya program dan kegiatan yang tepat sasaran dan bermanfaat dalam upaya pengentasan stunting yang melibatkan *multistakeholders* mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga faktor utama yang menjadi penghambat dalam proses *collaborative governance* untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Purworejo. Budaya paternalistik dan hierarkis yang masih kuat menghambat partisipasi setara dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, budaya organisasi juga perlu diperhatikan dalam setiap perencanaan program yang didukung dengan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Kedua, faktor institusi juga menjadi penghambat dalam proses *collaborative governance*. Koordinasi yang lemah antar lembaga pemerintah dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia menyulitkan pelaksanaan kolaborasi yang efektif. Selain itu, kurangnya insentif dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah

menghambat upaya kolaborasi yang berkelanjutan.

Ketiga, faktor politik turut menjadi penghambat dalam proses ini. Kurangnya komitmen dan dukungan politik dari pemimpin daerah dapat menghambat prioritas dan alokasi sumber daya untuk program percepatan penurunan stunting. Selain itu, adanya kepentingan politik tertentu dari aktor-aktor yang terlibat berpotensi menghambat tercapainya konsensus dan tujuan bersama dalam proses kolaboratif.

Saran

Berdasarkan apa yang telah diteliti, terdapat beberapa saran yang bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam proses collaborative governance dalam percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo :

1. Pastikan terdapat koordinasi yang kuat antara lintas sektor, non pemerintah, dan masyarakat. Kemudian diperlukannya dorongan untuk mengadakan pertemuan rutin antardinas sebagai upaya berbagi informasi, menyatukan visi, dan menentukan strategi bersama.
2. Disusunnya rencana aksi terpadu yang mencakup berbagai aspek yang relevan dengan penurunan stunting, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, gizi, dan pemberdayaan masyarakat. Rencana

ini harus mencakup target yang jelas, strategi intervensi, serta alokasi sumber daya dan anggaran yang memadai.

3. Dalam proses kolaborasi percepatan penurunan angka prevalensi stunting Kabupaten Purworejo diperlukan inovasi yang diciptakan oleh seluruh stakeholders yang terlibat.
4. Libatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan tokoh budaya lokal dalam proses perencanaan dan implementasi program.

Memasifkan keterlibatan swasta, akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. Pastikan ada koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan dinas terkait lainnya untuk mendukung implementasi program yang sesuai dengan budaya organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). Collaborative Governance in a mandated setting: shifting collaboration in stunting interventions at local level. *Development Studies Research, 10(1)*, 2212868.
- Anggara, Sahya. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Ansell, C. dan Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice, University of California*. Berkeley: Oxford University Press

- Astuti, Retno Sunu, Hardi Wasono, dan Abd. Rachim. (2020) *Collaborative Governance dalam prespektif Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press
- Dwiyanto, A. (2018). *Ilmu Administrasi Publik di Indonesia, Mencari Identitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Fatikha, N. T., & Permatasari, A. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 277. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2104> Diakses pada Maret 2024
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep Dan Regulasi). *Wedana*, 2(1), 200–208. [Http://Journal.Uir.Ac.Id/Index.Php/Wedana/Article/View/1824](http://Journal.Uir.Ac.Id/Index.Php/Wedana/Article/View/1824).
- Gubernur Jawa Tengah. (2019). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah*. <https://stunting.semarangkota.go.id/uploads/policies/20230726150947-2023-07-26policies150944.pdf>. Diakses pada November 2023
- Haryono, N. (2012). Jejaring Untuk Membnagun Kolaborasi Sektor Publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 1(4), 48-53.
- Heply, S. A., Kernianingsih, F., \$ Firman, F. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Relasi Publik*, 1(3).
- Herlianti, L. (2022). Collaboration of Actors in The Network in Stunting Prevention Programs in Bulukumba District. *Enrichment: Journal of Management*, 12(2), 2021-2026.
- Ipan, I., Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative Governance dalam penanganan stunting. *Kinerja*, 18(3), 383-391. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, pp. 543-571.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kemendag RI. (2022). *Monitoring Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi. Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri*. <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev> Diakses pada Januari 2024
- Kementrian Kesehatan RI. (2021). *Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021*. <https://www.slideshare.net/ssuser200d5e/hasil-survey-status-gizi-indonesia-tahun-2021-tingkat-kabupaten-kota>. Diakses pada Februari 2024.
- Kiranasari, F., Tohardi, A., & Aisyah, S. (2024). *Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang*. Al-Kharaj: *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 1216-1227..
- Niga, J. D. (2023). Collaborative Governance in an Effort to Reduce Stunting Rate in TTS District, NTT Province. *International Journal of Social Service and Research*, 3(4), 1060-1067.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik.
- Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi

- Kasus di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 12(2), 74-83.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tahun 2020-2024*.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tentang Percepatan Penurunan Stunting*
- Perlindungan, A., & di Aceh, K. S. A. *Jejaring Komunikasi Collaborative Governance*.
- Popova, T., Iskiv, M., Zagurska-Antoniuk, V., Buryk, Z., Matsyk, V., & Terentieva, N. (2020). The application of public-private partnership for the purpose of implementing state policy in the sphere of health care. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(3), 128-138.
- Priyono. (2020). Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Good Governance*, 16(2), 150-174
- Salsabila, F. S., & Santoso, R. S. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1), 1-22.
- Saputri, R. A. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 2 (2), 152-168.
- Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik*. Solo: Smart Media
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sukanti, S., & Faidati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Sleman. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 91-113.
- World Health Organization (WHO). (2023). *Malnutrition*. https://www.who.int/health-topics/malnutrition#tab=tab_1. Diakses pada Februari 2024.